

TESIS

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI
COVID-19 DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

***THE ANALYSIS OF COVID-19 VACCINATION POLICY
IN SOUTHWEST REGION OF MALUKU***

**JOSKA RAP RAP
K052211013**



**PROGRAM STUDI S2 ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI
COVID-19 DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN**

Disusun dan Diajukan Oleh

**JOSKA RAP RAP
K052211013**

Kepada

**PROGRAM STUDI S2 ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA**

Disusun dan diajukan oleh


**JOSKA RAP RAP
K052211013**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin pada tanggal 14 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Dr. Balqis, SKM., M. Sc. PH., M.Kes
NIP. 19790817 200912 2 001


Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D
NIP. 19720529 200112 1 001

Dekan Fakultas
Kesehatan Masyarakat

Ketua Program Studi
S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan


Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D
NIP. 19720529 200112 1 001


Prof. Dr. H. Indar SH, MPH
NIP. 19531110 198601 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Joska Rap Rap**
NIM : K052211013
Program studi : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Juli 2023

Yang menyatakan



Joska Rap Rap

ABSTRAK

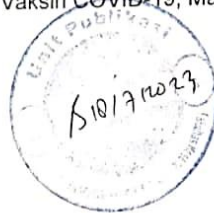
JOSKA RAP RAP. *Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid 19 Di Kabupaten Maluku Barat Daya.* (Dibimbing oleh **Balqis dan Sukri Palutturi,**).

Implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara yaitu komunikasi, sumber daya yang tersedia, disposisi tugas, dan struktur organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yang mempengaruhi faktor tersebut dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di Kabupaten Maluku Barat daya pada bulan November 2022 – Maret 2023, dengan jumlah informan sebanyak 12 orang yang terdiri dari informan kunci, informan biasa dan informan tambahan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis isi (*Content Analysis*), yakni menguraikan jawaban responden yang diperoleh dilapangan sesuai dengan fakta-fakta yang ada

Hasil penelitian diketahui pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di kabupaten Maluku Barat Daya telah terlaksana dengan baik, dimana pemerintah telah gencar melaksanakan sosialisasi dan promosi kesehatan, untuk sumber daya masih memadai yang dibekali kompetensi dan keahlian khusus anggaran dan fasilitas, pada disposisi pendistribusian tim vaksinator dilakukan berdasarkan kebutuhan, jumlah dan sasaran vaksinasi, sedangkan untuk struktur birokrasi telah mengangkat petugas yang diketuai Bapak Bupati Maluku Barat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah dalam melaksanakan program vaksin COVID-19.

Kata Kunci : Kebijakan, Vaksin COVID-19, Maluku Barat Daya



ABSTRACT

JOSKA RAP RAP. *The Analysis Of Covid-19 Vaccination Policy In Southwest Region Of Maluku.* (Supervised by **Balqis** and **Sukri Palutturi**)

The implementation of the COVID-19 vaccination policy can be influenced by several factors, including communication, available resources, task disposition, and organizational structure, so this study aims to conduct an analysis that influences these factors in its implementation. This research is a qualitative descriptive research where data collection techniques use observation and interviews.

This research is a qualitative descriptive research where data collection techniques use observation and interviews. The research was conducted in Southwest Maluku Regency in November 2022 – March 2023, with the number of informants as many as 12 people consisting of key informants, ordinary informants and additional informants. The data analysis used is content analysis, which describes respondents' answers obtained in the field in accordance with existing facts

The results of the study are known that the implementation of the COVID-19 Vaccination Policy in Southwest Maluku district has been carried out well, where the government has intensively carried out health socialization and promotion, has adequate resources equipped with special competencies and expertise. Although in its implementation there are many obstacles such as the number of hoax news, the demographics of the region are difficult to reach and access to communication throughout the region. It is hoped that the results of this study can be used as material for government evaluation in implementing the COVID-19 vaccine program.

Keywords : Policy, COVID-19 Vaccine, Southwest Maluku



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul “Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya” yang merupakan bentuk persyaratan dalam rangka penyelesaian program pendidikan Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Perkenankan pula penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Balqis, SKM, M.Kes, M.Sc.PH** selaku ketua komisi penasehat dan Bapak **Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes.,M.Sc.PH, Ph.D.** selaku sekretaris penasehat, yang tidak pernah lelah ditengah kesibukannya dengan penuh kesabaran memberikan arahan, perhatian, motivasi, masukan dan dukungan moril yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan penyusunan penulisan ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak **Prof. Dr. H. Indar, SH.,MPH, Bapak Prof. Dr.Atjo Wahyu, SKM.,M.Kes.,dan Ibu Prof. Dr. Masni, Apt., MSPH** selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan serta arahan dalam penyempurnaan penyusunan dan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin,
2. Bapak **Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes.,M.Sc.PH, Ph.D.,** selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
3. Bapak **Prof. Dr. H. Indar, SH., MPH** selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak **Marthen Rahakbauw, S.Kep, NS** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis
6. Seluruh staf Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
7. Orang tua dan anak-anak terkasih Grace, Eunike, Aldo, Jaferro dan Marlau serta saudara saudari yang selalu memberikan dukungan baik materil dan doa, serta semangat sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

8. Teman-teman seperjuangan Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kelas Kerjasama Maluku Angkatan II yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, dan saran serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua dan apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Makassar, 16 April 2023

Penulis

Joska Rap Rap

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Kebijakan Publik	14
B. Tinjauan umum Covid-19	24
C. Teori Pembuatan Kebijakan Publik	26
D. Sintesa penelitian.....	37
E. Kerangka Teori	49
F. Kerangka Konsep	50
G. Definisi Konseptual	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	61
C. Pengumpulan Data.....	62
D. Informan Penelitian.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Analisis Data.....	64
G. Penyajian Data.....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
B. Hasil Penelitian.....	68
C. Pembahasan.....	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tabel Sintesa	37
------------	---------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik.....	27
Gambar 2. 2	Kerangka Teori Penelitian	49
Gambar 2. 3	Kerangka Konsep	52

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 *Bel Etik Dan Emik Penelitian*

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4. Persuratan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang turut merasakan pandemi COVID-19 sejak diumumkan pada bulan maret 2020 dengan 2 kasus konfirmasi. Banyaknya kasus positif di Indonesia meningkat, hingga pada tanggal 8 September 2021 kasus tersebut mencapai angka 4.147.365 kasus positif, dengan jumlah kematian akibat COVID-19 tercatat 137.782 kasus. Akibatnya Indonesia menjadi negara dengan kasus tertinggi COVID-19 di Asia Tenggara (Kemenkes RI, 2021a). Terhitung dari tanggal 7 September 2021 lima provinsi di Indonesia tercatat sebagai provinsi terbesar kasus covid-19, yakni Jawa timur dengan 614 kasus, DKI Jakarta 360 kasus, Jawa Tengah 512 kasus, Sumatera Utara 520 kasus, serta Jawa Barat 545 kasus. (Satgas COVID-19 P2P,2021). Kemudian pada tanggal 8 September 2021 Sumatera Utara menjadi provinsi terkonfirmasi paling tinggi untuk kasus positif COVID-19 di pulau Sumatera, dengan jumlah 459 kasus dan 37 kasus meninggal dunia. Sampai pada tanggal 9 Oktober 2021 jumlah kasus positif di Sumatera Utara makin meningkat mencapai 18.149 kasus dan jumlah kematian 679 kasus serta 15.410 terkonfirmasi sembuh (Dinas Kesehatan Kota Medan, 2021).

Salah satu upaya Pemerintah dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air ialah dengan kebijakan vaksinasi Covid-19. Kebijakan vaksinasi Covid-19 merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat top-down, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk: mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Bantuan vaksin dari Pemerintah Pusat diberikan secara gratis/tidak dipungut biaya.

Jumlah kasus terkonfirmasi di Provinsi Maluku sampai dengan 2022 tercatat kasus positif sebanyak 18.798 kasus dengan kesembuhan sebanyak 18.468 kasus dan 301 kasus meninggal dunia. Adapaun di Kabupaten Maluku Barat Daya sendiri per tahun 2021 tercatat 118 Kasus dengan kesembuhan 114 kasus dan 4 kasus meninggal, per tahun 2022 tercatat 461 Kasus dengan kesembuhan 457 kasus dan 0 kasus meninggal. (SATGAS COVID-19 Kabupaten Maluku Barat Daya, 2021-2022)

Kondisi ini memberikan dampak langsung bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebagai akibat dari penyebaran COVID-19 dilaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat hingga diberlakukannya lockdown sehingga terhambatnya seluruh kegiatan masyarakat. Kebijakan dilakukan demi menghambat penyebaran virus COVID-19 secara efektif (Dinas Kesehatan Kab. Maluku Barat Daya, 2021).

Situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi membuat pemerintah Indonesia berusaha untuk mencegah angka penyebaran COVID-19 yang terus meningkat, sehingga diadakan program vaksinasi COVID-19. Percepatan program vaksinasi COVID-19 ini demi untuk membantu penyusunan imunitas tubuh individu sehingga diharapkan hal ini bisa mempersingkat terbentuknya Herd Immunity (kekebalan kelompok) yang berpengaruh terhadap turunnya kasus yang terinfeksi. Pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia total sasaran berjumlah 208.265.720 dengan sasaran yang telah di vaksinasi COVID-19 sebanyak 70.855.762. Dengan persentase vaksinasi tahap pertama sebesar 34.02% dan total vaksinasi tahap kedua sebanyak 40.611.709, dengan persentasi sebesar 19.50% dan total vaksinasi tahap ketiga sebanyak 750.507 dengan persentase sebesar 51.10% telah tercapai di Indonesia (Kemenkes RI, 2021c).

Angka cakupan program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Maluku belum merata sepenuhnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cakupan

vaksinasi dosis 1 di provinsi Maluku Maret 2022, telah mencapai 70,68%. Angka ini setara dengan 1 juta peserta vaksin dari target yang ditetapkan sebanyak 1,42 juta orang.

Berdasarkan data vaksinasi Covid-19 di Provinsi Maluku, Vaksin dosis 1 tiga besar paling rendah di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu 79,373 jiwa (43,18% dari target), selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu 63,793 jiwa (53,82% dari target provinsi). Selanjutnya Kabupaten Buru Selatan 38,309 jiwa (59,54% dari target provinsi). Hal ini menunjukkan belum merata sepenuhnya vaksinasi Covid-19 di Provinsi Maluku.

Tim vaksinasi Kabupaten Maluku Barat Daya mengupayakan pelaksanaan percepatan Vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Salah satunya dengan sosialisasi dan mengadakan penyuluhan keliling mengenai bahaya COVID-19 dan pentingnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya informasi yang tidak benar yang beredar sehingga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bisa mencapai Target. Target percepatan program pelaksanaan vaksinasi terhambat di Kabupaten Maluku Barat Daya, hal ini dikarenakan kondisi geografis dan kesadaran masyarakat masih tergolong rendah. Setelah melihat berbagai permasalahan yang terjadi dengan menilai bahwa Program Vaksinasi COVID-19 yang dibentuk merupakan salah satu dari strategi dengan tujuan untuk menurunkan angka kenaikan kasus positif dan kematian akibat COVID-19, dengan ini harapan ditengah Pandemi COVID-19 angka ini bisa ditekan. Sesuai dengan aturan terkait

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan COVID-19 yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 18 Tahun 2021, Sebagai perubahan dari PERMENKES Nomor 10 Tahun 2021.

Dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Maluku, Kabupaten/kota yang data cakupan vaksinasi Covid-19 paling rendah yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat, sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan yang terendah ke – 7 (tujuh) pada cakupan vaksinasi dosis kedua 52.14% dan terendah ke – 5 (lima) pada cakupan vaksinasi covid 19 dosis ketiga 9.87%. Angka cakupan program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya belum mencapai target. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas Covid-19 Provinsi Maluku, jumlah kumulatif sasaran vaksinasi 60.644 jiwa, jumlah sasaran vaksinasi harian 371 jiwa, jumlah kumulatif vaksinasi dosis I 51,526 jiwa (73,39% dari target provinsi), jumlah kumulatif vaksinasi dosis II 34,374 jiwa (48,96% dari target provinsi), jumlah kumulatif vaksinasi dosis III 6,125 jiwa (8,72% dari target provinsi). Target vaksin 1 provinsi Maluku yaitu 1,613,247 jiwa, target vaksin 2 yaitu 885,532 jiwa, dan target vaksin 3 yaitu 885,532 jiwa. Kabupaten Maluku Barat Daya belum mencapai target.

Menurut Almanzani (2022), ketidakefektifan program vaksinasi dapat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 belum berjalan optimal ditandai dengan aspek kejelasan dan konsistensi komunikasi

belum efektif, aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana belum optimal, aspek SOP pada struktur birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya, serta terdapat delapan hambatan, diantaranya rendahnya partisipasi masyarakat, keterpaparan terhadap hoax, keterbatasan petugas vaksinasi COVID- 19, insentif petugas vaksinasi COVID-19 yang belum memadai, dosis vaksinasi COVID-19 yang rusak, keraguan terhadap vaksin, aplikasi dan jaringan yang bermasalah, dan pelayanan vaksinasi COVID-19 yang tidak sesuai dengan SOP.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widharyadi (2022), menyatakan bahwa kurang efektifnya implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 terjadi karena adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya, seperti keterbatasan dan keterlambatan distribusi vaksin Covid-19, penyebaran gerai vaksinasi dan tenaga vaksinator yang belum merata, kurangnya sinergi antar instansi dalam pelaksanaan program vaksinasi hingga masih adanya ketakutan masyarakat akan dampak lanjutan pasca vaksinasi. Adapun untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, perlu penguatan sinergi antar instansi dalam percepatan program vaksinasi melalui tahapan pengorganisasian, interpretasi dan penerapan. pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, Perlu analisa dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan kebijakan oleh masing-masing instansi dan stakeholder untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi guna dilakukan pembenahan agar capaian target vaksinasi dapat tercapai sesuai sasaran yang ditetapkan.

Program vaksinasi COVID-19 di masa pandemi sangatlah urgent untuk diteliti guna mengetahui apa yang terjadi dalam Implementasi Program Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya. Realisasi vaksin kepada sasaran jauh dari target yang ditetapkan dapat disebabkan adanya keengganan calon penerima vaksin menginformasikan penyebab ketidakhadirannya kepada petugas fasilitas Kesehatan, kurang aktifnya kelompok sasaran calon penerima vaksin untuk datang sesuai jadwal yang ditetapkan. Penyebab lainnya yang tak kalah penting adalah kurang sinkronnya data calon penerima vaksin yang diperoleh fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara, karena beberapa diantaranya data yang masuk terdapat calon penerima vaksin yang merupakan penyintas, bahkan beberapa lainnya ditemukan telah melakukan vaksinasi ditempat lain (Akbar, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2022) di kabupaten Cirebon mengatakan bahwa Komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara sistematis dan massive baik itu komunikasi transmisi, komunikasi konsisten. Namun, dalam komunikasi kejelasan sedikit ada kendala yaitu terdapatnya perubahan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 membuat bingung peserta vaksinasi Covid-19. Kedua, Sumber daya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memadai, mencukupi dan berkualitas baik. Ketiga, Disposisi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan system-approach menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi telah

berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan dan penolakan yakni, masih terdapat lansia yang belum di vaksin, stok vaksin terbatas, terjadinya antrian panjang pada pelaksanaan vaksin (Oktary, 2022)

Pelaksanaan dari penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian ini berfokus mengenai implementasi kebijakan program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan untuk melihat indikator komunikasi, keputusan, dan kebijakan dari pengelola program dan stakeholder yang menjadi unsur penting. Selain itu faktor dukungan komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi juga termasuk hal yang krusial dimana nantinya akan dilihat pada saat penelitian dilaksanakan, apakah sudah berjalan dengan baik sebagaimana fungsinya. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam aturan terkait Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan COVID-19 yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 18 Tahun 2021.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Almanzani (2022), implementasi kebijakan vaksin COVID-19 di kota Banda Aceh belum terlaksana dengan optimal, terutama pada aspek kejelasan dan konsistensi komunikasi. Aspek komunikasi menjadi salah satu kendala yang menjadikan program ini tidak terlaksana dengan optimal. Hasil penelitian menunjukkan Kota Banda Aceh telah berupaya dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi COVID-19 dengan turut bergandengan antar lintas sektor melalui usaha transmisi komunikasi secara internal dan eksternal, namun dari aspek kejelasan informasi dan konsistensi dalam

penyampaian informasi dalam komunikasi masih belum sepenuhnya berjalan dengan sempurna.

Menurut Nugroho (2022), komunikasi menjadi suatu variabel yang sangat penting. Informasi terkait waktu pelaksanaan dan ketersediaan jumlah vaksin harus terus dilakukan dengan sangat intens untuk menjaga antusias masyarakat yang saat ini terus meningkat. Selain itu perlu ditingkatkan juga untuk sosialisasi terkait vaksin yang tersedia, untuk mengirangi berita hoax yang tersebar ditengah-tengah masyarakat.

Sumber Daya mempunyai peran pada pelaksanaan kebijakan betapa jelas dalam konsistensi aturan dan ketentu serta betapa akurat tersampainya aturan atau ketentuan itu, apabila beberapa implementator kebijakan mempunyai kewajiban dalam melaksanakan kebijakan yang efektif sehingga pelaksanaan kebijakan akan efektif. Pelaksanaan kebijakan tak akan sukses tanpa ada support oleh sumberdaya berkualitas serta berkuantitas. mutu sumberdaya terkait keahlian, sumbangsih, profesionalisme, serta kemampuan dirinya, sebaliknya berkuantitas terkait besaran sumber daya apa telah memenuhi keseluruhan target yang dituju. Sumber daya penting pada kesuksesan pelaksanaan, karena dengan sumber daya yang handal, pelaksanaan suatu program akan berjalan baik. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2021), terkait implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di kota Surakarta menyatakan bahwa jumlah dan kemampuan sumber daya merupakan factor penting keberhasilan implementasi vaksinasi ini, terlebih jika jumlah target sasaran juga ikut meningkat. Sumberdaya menjadi hal

penting karena penentu utama terselenggaranya program vaksin ini, dimana perlu adanya petugas yang kompeten dalam melaksanakan tugas sebagai vaksinator, memiliki kemampuan menjelaskan atau implementasi yang baik. Selain itu sumberdaya sarana prasarana dan sumber daya biaya juga sangatlah penting demi terlaksananya program ini.

Perilaku dan karakter dari implementator program memiliki peran mewujudkan implementasi selaras target dan maksud kebijakan. Pelaksana suatu program perlu mempunyai karakter contohnya komitmen dan ketulusan. Ketulusan memfokuskan pelaksana guna konstan ada pada garis tujuan kebijakan. sebaliknya komitmen besar oleh implementator program mengaktualkan pelaksana program tetap antusias pada pelaksanaan tugasnya, kewenangan, fungsinya dan kewajibannya sejalan aturan sudah di tetapkan. perilaku pelaksana kebijakan akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ketika pelaksanaan implementasi mempunyai perilaku yang baik sehingga dapat melaksanakan program dengan baik seperti yang di inginkan dari penyusun kebijakan. jikalau perilakunya mendukung sehingga pelaksanaan berjalan optimal (Akbar, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugorho (2022) implementasi kebijakan Vaksin COVID-19 di kabupaten Cirebon Disposisi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak merecrut tim relawan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Disposisi atau sikap petugas menjadi salah satu unsur dalam penerapan vaksinasi Covid-19

berjalan efektif. Sehingga Disposisi/petugas pelaksana dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mempunyai dua faktor yaitu penganggatan birokrat dan kemampuan menyusun rencana kegiatan pelatihan guna meningkatkan kapasitas vaksinator dan tenaga kesehatan.

Secara struktur birokrasi penanganan COVID-19 berada pada tupoksi bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, namun juga bekerja sama dengan bidang lainnya. Meski tanggung jawab yang lebih besar berada pada bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, bidang lainnya juga turut membantu dan bersinergi dalam mengatasi COVID-19.

Menurut Almanzani (2022) secara structural penanganan COVID-19 sudah sangat jelas karena setiap organisasi/bidang memiliki tupoksi kerja yang berbeda-beda. Meski dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan, dan mengalami banyak kendala. Struktur birokrasi berperan dalam sistematis dan massive-nya dalam menjalankan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Tujuan dari struktur birokrasi merupakan upaya pemerintahan lebih mudah untuk pembagian tugas dan tanggung jawab pada tiap individu dalam menjalankan vaksinasi Covid-19. Selain itu, bisa membantu pemerintah dalam menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Struktur birokrasi memiliki dua aspek yaitu Standars Operasional Prosedure (SOP) dan fragmentasi/ penyebaran tanggungjawab (Nugroho, 2022).

Berdasarkan hasil pengamatan yang bersumber dari wawancara nantinya dalam penelitian di lapangan guna menunjukkan fenomena pada

implementasi program pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Sehingga harapannya mampu memberikan wawasan serta pedoman tentang analisis implementasi kebijakan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya. Oleh karenanya peneliti menjadikan “Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya” sebagai judul penelitian

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian :

- a. Untuk menganalisis komponen komunikasi terhadap kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya.
- b. Untuk menganalisis komponen sumber daya terhadap Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya.

- c. Untuk menganalisis komponen disposisi terhadap kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya.
- d. Untuk menganalisis komponen struktur birokrasi kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Kesehatan dapat memberikan suatu masukan dan dijadikan evaluasi mengenai keberhasilan terkait program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Bisa Mahasiswa hasil ini diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi bahan studi pustaka untuk mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin yang hendak melakukan penelitian terkait topik yang sama

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan opsi terpenting untuk memperkuat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintah maupun swasta. Adapun kebijakan publik yang merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut David Easton kebijakan publik adalah alokasi nilai yang sah untuk semua anggota publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah dan pejabat. Padahal kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dalam bentuk tindakan pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. (Nunsi, 2020)

Sementara definisi kebijakan publik atau negara didefinisikan secara berbeda oleh para ahli, seperti yang dinyatakan oleh Dye dalam (Muadi, 2016), bahwa kebijakan negara sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut Dye mengatakan, jika pemerintah memilih melakukan sesuatu harus ada tujuan dan objektif serta mencakup semua tindakan pemerintah. Selain itu, kebijakan ini memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yaitu:

- a. Kebijakan adalah praktik sosial, kebijakan bukan acara tunggal atau terisolasi. Dengan demikian, kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah yang dirumuskan berdasarkan semua peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kejadian ini tumbuh dalam praktik kehidupan publik, dan bukan acara yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan merupakan respon terhadap peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan keharmonisan dari pihak-pihak yang berkonflik, atau membuat insentif atas tindakan bersama bagi pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan tidak rasional terhadap perusahaan patungan.

Kebijakan publik adalah proses yang berkesinambungan, oleh karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997). Kebijakan yang telah dirumuskan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan berhasil, jika dalam pelaksanaannya tidak ada hubungannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas dalam (Muadi, 2016), menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi masalah
- b. Penyusunan agenda
- c. Perumusan kebijakan
- d. Pengesahan kebijakan
- e. Implementasi kebijakan
- f. Evaluasi kebijakan

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan good governance, maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi sebagai berikut:

- a. Konsistensi: Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.
- b. Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti.
- c. Akuntabilitas: Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- d. Keadilan: secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan,

kebijakan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

- e. Partisipatif masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat di samping menopang pencetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan proses evaluasi/pengendalian terhadap kinerja pemerintah dan dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik, karena partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini meliputi pengawasan eksekutif melalui legislatif.
- f. Efektivitas: berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditentukan, atau pencapaian tujuan pelaksanaan tindakan, yang berkaitan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas diukur dengan keberhasilan mencapai tujuan dan tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan publik.
- g. Efisiensi: menyangkut jumlah penggunaan sumber daya yang

diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumber daya. Indikator pengukuran yang dapat digunakan dalam dimensi efisiensi adalah penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang dapat diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, orang, peralatan, dan sumber daya lainnya. (Ramdhani, 2017)

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai kebijakan publik, dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini tindakan pemerintah untuk tidak menanggapi permasalahan yang ada, juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan aspirasi bersama. (Herdiana, 2018).

Dalam pelaksanaan kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Menurut Dunn ada 6 indikator evaluasi kebijakan, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsif dan Akurasi.

1. Implementasi Kebijakan Publik

Penerapan kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah suatu kebijakan bersentuhan dengan kepentingan publik dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa dalam tahap

perencanaan dan perumusan kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahap implementasi tidak dianggap optimalisasi, maka tentu saja tidak jelas apa yang diharapkan dari suatu produk kebijakan. Pada akhirnya, dipastikan pada tahap evaluasi kebijakan akan menghasilkan penilaian bahwa antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan tidak sejalan, bahwa implementasi kebijakan tidak sesuai harapan, bahkan menjadikan produk kebijakan sebagai batu sandungan bagi para pengambil kebijakan itu sendiri. (Aneta,2010)

Pendapat yang berbeda Wahab (dalam Mustari, 2011) Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan kebijakan perumusan. Definisi kebijakan implementasi yang umum digunakan adalah implementasi adalah tindakan yang diambil oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara bagi sebuah kebijakan untuk mencapai tujuannya. Untuk menerapkan kebijakan publik, terdapat dua opsi langkah yang langsung dilaksanakan dalam bentuk program atau melalui perumusan kebijakan turunan atau turunan kebijakan publik sebagai penjelasan kebijakan publik atau sering disebut sebagai aturan implementasi (Nugroho, 2012)

Secara umum implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai

tindakan yang dilakukan pemerintah atau swasta, baik berupa individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2005), mendefinisikan implementasi kebijakan publik, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan pemerintah digunakan untuk menyelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus

analisis, model-model implementasi kebijakan pemerintah itu, antara lain:

a. Model *“the top down approach”* menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (2005), yaitu implementasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dapat sempurna, dengan persyaratan:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi badan pelaksana tidak akan menimbulkan kendala serius.
2. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai untuk melaksanakan program.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan disadari oleh suatu hubungan kausalitas yang ada.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang tepat.
10. Pihak-pihak yang berwenang dapat menentukan dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b. Model proses implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van

Horn dalam Wahab (2005), yaitu perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang bersangkutan. Implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, dan kesepakatan terdapat tujuan, terutama yang terlibat di lapangan relatif tinggi sehingga perlu tipologi kebijakan yang dibedakan berdasarkan:

- 1.) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.
- 2.) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat.

c. Model kerangka analisis implementasi menurut D. Mazmanian dan P.A. Sabatier dalam Wahab (2005), yaitu nilai penying analisis implementasi kebijakan pemerintah adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel itu terbagi dalam tiga kategori yaitu:

- 1.) Mudah tidaknya masalah (yang akan dipecahkan dikendalikan).
- 2.) Kemampuan keputusan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat.

Pengaruh langsung berbagai variabel politik terdapat keseimbangan dukungan bagi tujuan termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

3. Kategori Kebijakan Publik

Kategori kebijakan publik Ada banyak sekali pengkategorian kebijakan publik, berikut ini kategori kebijakan publik menurut beberapa ahli:

James E. Anderson sebagaimana dikutip Suharna (2010:24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods).

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian

barang atau pelayanan public. Sedangkan , kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

E. Tinjauan umum Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Coronavirus atau virus Corona merupakan keluarga besar virus yang menyebarkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti: Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).

2. Penyebab Infeksi Coronavirus

Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya seperti:

- a. Percikan air liur pengidap (batuk dan bersin).
- b. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi.
- c. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona.
- d. Tinja atau feses (jarang terjadi).

Khusus untuk covid-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus

pertama masuk ke dalam tubuh. Disamping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar.

3. Gejala Infeksi Coronavirus

Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang, dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan:

- a. Hidung beringsus
- b. Sakit kepala.
- c. Batuk
- d. Sakit tenggorokan
- e. Demam
- f. Merasa tidak enak badan.

Hal yang perlu ditagaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berupa menjadi bronkitis dan pneumonia (disebabkan oleh COVID-19), yang mengakibatkan gejala seperti:

- a. Demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia.
- b. Batuk dengan lendir
- c. Sesak napas

d. Nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk.

Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia

F. Teori Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik berlangsung dalam suatu lingkungan sosial politik dan kelembagaan dengan unsur yang kompleks, subjek, dan objek yang berbeda-beda, latar belakang yang bervariasi, dan dengan kepentingan serta motif-motif majemuk. Hal ini menurut (Mustopadidjaja, 2003:2) bisa terjadi karena proses pembuatan kebijakan publik bukanlah semata-mata kegiatan teknis-teknokratis, tetapi juga kegiatan sosiopolitis yang dinamis, dan berlangsung dalam system kelembagaan yang kompleks.

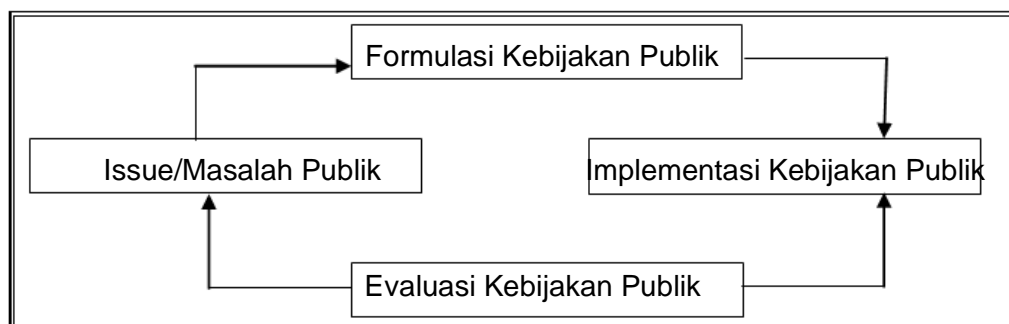
Menurut Howlet dan Ramesh, (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah
2. Formulasi Kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah
3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan
4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yakni proses untuk

melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil

5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan

Menurut (Cochran dan Malone, 1999:39), proses pembuatan kebijakan public terbagi dalam lima tahapan yakni, identifikasi masalah dan agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi dan evaluasi. Para pakar kebijakan public kemudian menyederhanakan proses kebijakan publik tersebut menjadi tiga tahapan. Menurut Mustopadidjaja (2002:3) dari sudut manajemen proses pembuatan



Gambar 2. 1 Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik

Sumber : Mustopadidjaja, (2002:3)

Dalam teori implementasi kebijakan, dalam menerapkan suatu kebijakan perlu dirancang dan dipersiapkan dengan sangat baik. Maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi

harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik (Mustopadidjaja, 2002:3).

Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu: komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi, keempat factor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Adapun gambaran tentang variabel-variabel tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampiran, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya (Anwar Arifin, 2000:5). Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas.

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan

aparat pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).

a. Penyaluran Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun seringkali keputusan telah dibuat dan perintah pelaksanaannya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana diharapkan. Bisa jadi keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut atau mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangannya terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang menjadi acuan.

Hal ini mungkin dapat terjadi disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam penyaluran komunikasi terhadap suatu keputusan atau hambatan yang dibuat. Menurut (Winarno 2002:17) hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.) Adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan

perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan ini menimbulkan distorsi terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan kekuasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melakukan suatu keputusan.

- 2.) Adanya hirarki birokrasi yang berlapis-lapis dan mempunyai struktur yang ketat sehingga kondisi ini akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana.
- 3.) Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

b. Kejelasan Komunikasi

Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi, karena ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak menyenangi atau tidak menyetujui terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau

dikhawatirkan akan merugikan dan mengecewakan salah satu pihak. Ketidakjelasan dalam berkomunikasi, mungkin juga disebabkan karena mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

c. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi disini mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan.

Tingkat keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

2. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat,

jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak berjalan. Oleh karena itu sumber-sumber yang penting meliputi:

a.) Kecukupan dan Kualifikasi

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterlampiran yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterlampiran yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterlampiran juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

b.) Kewenangan

Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

c.) Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d.) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

3. Sikap

Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Menurut (Winarno,2004:142) jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka

proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit.

Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepakat dalam melihat substansi suatu kebijakan, yang berbeda dengan pandangan mereka. Di samping itu mungkin sikap para pelaksana yang menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan melihat secara selektif persyaratan atau mengabaikan beberapa persyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Menurut Edward III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Standard Operating Procedure berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP mungkin

menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut.

Dari keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya SOP atau petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa mengurangi makna secara keseluruhan. Karakteristik yang kedua dalam birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing-masing, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan kompleks membutuhkan koordinasi.

Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan

untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Dari keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pada dasarnya banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai teori implementasi kebijakan antara lain; Van meter Van horn, Mazmanian sabatier, Grindle, George Edward III. Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George Edward III karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian, selain itu mengacu pendapat Edward III yang mengatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Dalam kaitanya dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi program BOS dengan menggunakan 4 variabel (komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi) sebagaimana yang tertuang dalam teori Edward III.

G. Sintesa penelitian

Tabel 2. 1 Tabel Sintesa

No	Nama/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Doni Nugroho, Subhan, Agus Irfan (2022)	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)	Untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon	Penelitian menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif	Hasil penelitian yaitu Pertama, Komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara sistematis dan massive baik itu komunikasi transmisi, komunikasi konsisten. Namun, dalam komunikasi kejelasan sedikit ada kendala yaitu terdapatnya perubahan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 membuat bingung peserta vaksinasi Covid-19. Kedua, Sumber daya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memadai, mencukupi dan berkualitas baik. Ketiga, Disposisi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak merecruit tim relawan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Keempat, Struktur birokrasi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menggunakan struktur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
2	RB M. Akbar T. A. P, Diaz Virdani, Kiki Darma Kasih,	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19	Untuk mendeskripsi kan implementasi kebijakan	Dalam penelitian memakai metode kualitatif deskriptif.	Hasilnya penelitian menunjukkan Pelaksanaan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya pada realitanya menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di

	Lukman Arif (2021)	Di Kota Surabaya	vaksinasi COVID-19, ditemui faktor yang mendukung dan penghambat serta upaya mengatasinya di Kota Surabaya		Surabaya antara lain realisasi vaksin kepada sasaran jauh dari target yang ditetapkan, keengganan calon penerima vaksin menginformasikan penyebab ketidakhadirannya kepada petugas fasilitas Kesehatan, kurang aktifnya kelompok sasaran calon penerima vaksin untuk datang sesuai jadwal yang ditetapkan. Penyebab lainnya yang tak kalah penting adalah kurang sinkronnya data calon penerima vaksin yang diperoleh fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara, karena beberapa diantaranya data yang masuk terdapat calon penerima vaksin yang merupakan penyintas, bahkan beberapa lainnya ditemukan telah melakukan vaksinasi ditempat lain.
3	Anjani Eka Puteri, Esa Yuliarti, Nabilla Putri Maharani, Atika Alya Fauzia, Yohanes Sandy Wicaksono, Novita Tresiana, 2022	Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia	untuk melengkapi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan kolaborasi pemerintah pusat dengan pihak-pihak lainnya serta memberikan sudut pandang baru terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi	Metode yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kepustakaan (library research).	Salah satu faktor yang menghambat pengimplementasian vaksinasi Covid-19 yaitu keraguan masyarakat terhadap efektivitas vaksin. Namun, ketika pemerintah berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, maka pengimplementasian vaksinasi Covid-19 mulai terlaksana dengan baik sehingga implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat.

			dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19, dampak vaksinasi bagi masyarakat, serta hal-hal yang terjadi setelah kebijakan vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan.		
4	Febiola Utami, 2022	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Batam Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi	untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam dalam rangka penanggulangan pandemi serta mendeskripsikan hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya.	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian dilihat dari dimensi standar dan sasaran kebijakan yaitu dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dan diikuti dengan petunjuk teknis yang berlaku, kemudian kebijakan ini sudah tepat sasaran. Sumberdaya, belum optimal karena terkendala pada ketersediaan jumlah vaksin. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, belum optimal dikarenakan rendahnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi PCare dan SMILE untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Karakteristik badan-badan pelaksana, sudah cukup optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kecenderungan pelaksana, sudah cukup optimal dilihat dari pemahaman dan respon positif dari para implementor untuk mendukung kebijakan ini. Kondisi

					ekonomi, sosial dan politik sudah cukup optimal dapat dilihat dari keterlibatan dan dukungan dari organisasi pemerintahan maupun diluar pemerintahan, walaupun masih terdapat masyarakat yang kurang memiliki pemahaman terkait pentingnya melakukan vaksinasi dan terpengaruh berita-berita hoax atau melakukan vaksinasi hanya sekedar sebagai syarat administrasi.
5	Fitriyana, Akhmad Nikhrawi Hamdi, Beni Akhmad, 2021	Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 Di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin	untuk mengetahui apa saja kebijakan Pemerintah mengenai pemberian Vaksin untuk mengurangi laju pertumbuhan kasus Covid-19 di Kelurahan Pekapuran Raya dan kendala apa saja saat pemberian Vaksin di Kelurahan Pekapuran Raya.	Metode dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kelurahan Pekapuran Raya sudah melakukan dengan sesuai Kebijakan Pemerintah untuk Pemberian Vaksin terhadap pengurangan kasus Covid-19 namun saja masih Kendala lainnya yang dihadapi yaitu keterbatasannya persediaan, dan pendistribusian vaksin Covid- 19,yang menyebabkan harus menunggu beberapa hari dulu bahkan ada yang tidak mendapatkan/kebagaian nomer antrian karena masyarakat sangat banyak yang ingin di vaksin. Tetapi kendala utama yang terjadi di daerah pekapuran raya itu terkhusus untuk para Lansia yang mana sebagian dari Lansia sudah ingin melakukan vaksinasi namun terhambat dengan bagaimana mereka pergi kelokasi vaksinasi dan juga masih banyak informasi yang mengatakan jika Lansia tidak boleh di vaskin karena dapat menyebabkan resiko yang berbahaya sehingga mengakibatkan tertunda dan bahkan tidak mendapatkan vaksin

6	Nurul Wahdaniyah, 2021	Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Gowa	untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.	Model penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendeskripsikan serta menjelaskan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa dan tidak terlepas dari 3 indikator evaluasi kebijakan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil, artinya pendekatan yang digunakan untuk mengukur sebuah keberhasilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa dalam penanganan Covid-19 2) Efisiensi, adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa dalam penanganan Covid-19 3) Responsivitas, yang dimaksud adalah seberapa cepat pemerintah menangani pandemi Covid-19 dan bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan yang efektif.
7	Feni Huspita Sari, Ade Uswatun Hasanah	Analisis Implementasi Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palembang	untuk menganalisis implementasi program vaksinansi Covid-19 di Kota Palembang dan juga untuk mengetahui faktor-	Pendekatan yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin, yaitu: (1) Melihat Kepatuhan (2) Lancarnya	Hasil penelitian ini adalah kebijakan program vaksin covid-19 di Kota Palembang cukup berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang dampak yang dikehendaki pemerintah.

			faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program vaksinasi covid-19 di Kota Palembang.	Pelaksanaan rutinitas Fungsi (3) Terwujudnya dampak yang dikehendaki. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan.	
8	Chika Putri Aprilia, Tri Sulistyaningsi, Salahudin	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Sangatta Utara Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur	menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dari implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur di Kecamatan Sangatta Utara.	pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder dan data primer	Hasil temuan yang didapat yaitu masyarakat yang melakukan vaksinasi dosis kedua cenderung menurun karena beberapa hal, salah satunya yaitu sebagian masyarakat hanya mengikuti vaksin pertama sebagai syarat untuk berpergian keluar daerah. Secara umum, untuk implementasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara sendiri sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki agar implementasi vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara semakin lebih baik untuk kedepannya.
9.	Niken, Putri Mia, Septiana, Reyhan, Argha, Putra	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Boyolali	mengetahui mengenai bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi di Boyolali.	metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif.	Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Boyolali sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10	Wilda Tri Yuliza, Febriyanti Nursya, Gusni Rahma	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Padang	menganalisis implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Padang	kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen	Hasil penelitian didapatkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Padang telah mengetahui adanya kebijakan terkait vaksinasi Covid-19 dari media informasi dan himbauan yang ada. Diperlukan strategi sosialisasi yang tepat agar dapat menjangkau semua kelompok sasaran dan memberikan pemahaman bahwa Kota Padang ikut memberlakukan dan menyukseskan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021.
11.	Melsy Oktary	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Dalam Tinjauan Msn Approach	mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.	metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi.	berdasarkan system-approach menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi telah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan dan penolakan yakni, masih terdapat lansia yang belum di vaksin, stok vaksin terbatas, terjadinya antrian panjang pada pelaksanaan vaksin.
12.	Doni Nugroho, Subhan, Agus Irfan	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Cirebon (Studi	untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan	Penelitian menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Adapun teknik	Hasil penelitian yaitu Pertama, Komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara sistematis dan massive baik itu komunikasi transmisi, komunikasi konsisten. Namun, dalam komunikasi kejelasan sedikit ada kendala

		Kasus Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)	Plered dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.	pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pemilihan informan dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan teknik snowball.	yaitu terdapatnya perubahan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 membuat bingung peserta vaksinasi Covid-19. Kedua, Sumber daya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memadai, mencukupi dan berkualitas baik. Ketiga, Disposisi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak merecrut tim relawan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Keempat, Struktur birokrasi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menggunakan struktur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
13	RB M. Akbar T. A. P., Diaz Virdani, Kiki Darma Kasih Lukman Arif	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya	mendeskripsikan implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19, ditemui faktor yang mendukung dan penghambat serta upaya mengatasinya di Kota Surabaya.	metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara dan Pengamatan.	Pelaksanaan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya pada realitanya menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Surabaya antara lain realisasi vaksin kepada sasaran jauh dari target yang ditetapkan, keengganan calon penerima vaksin menginformasikan penyebab ketidakhadirannya kepada petugas fasilitas Kesehatan, kurang aktifnya kelompok sasaran calon penerima vaksin untuk datang sesuai jadwal yang ditetapkan. Penyebab lainnya yang tak kalah penting adalah kurang sinkronnya data calon penerima vaksin yang diperoleh fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara, karena beberapa diantaranya data yang masuk terdapat calon penerima vaksin yang merupakan penyintas, bahkan beberapa lainnya ditemukan telah melakukan vaksinasi ditempat lain.

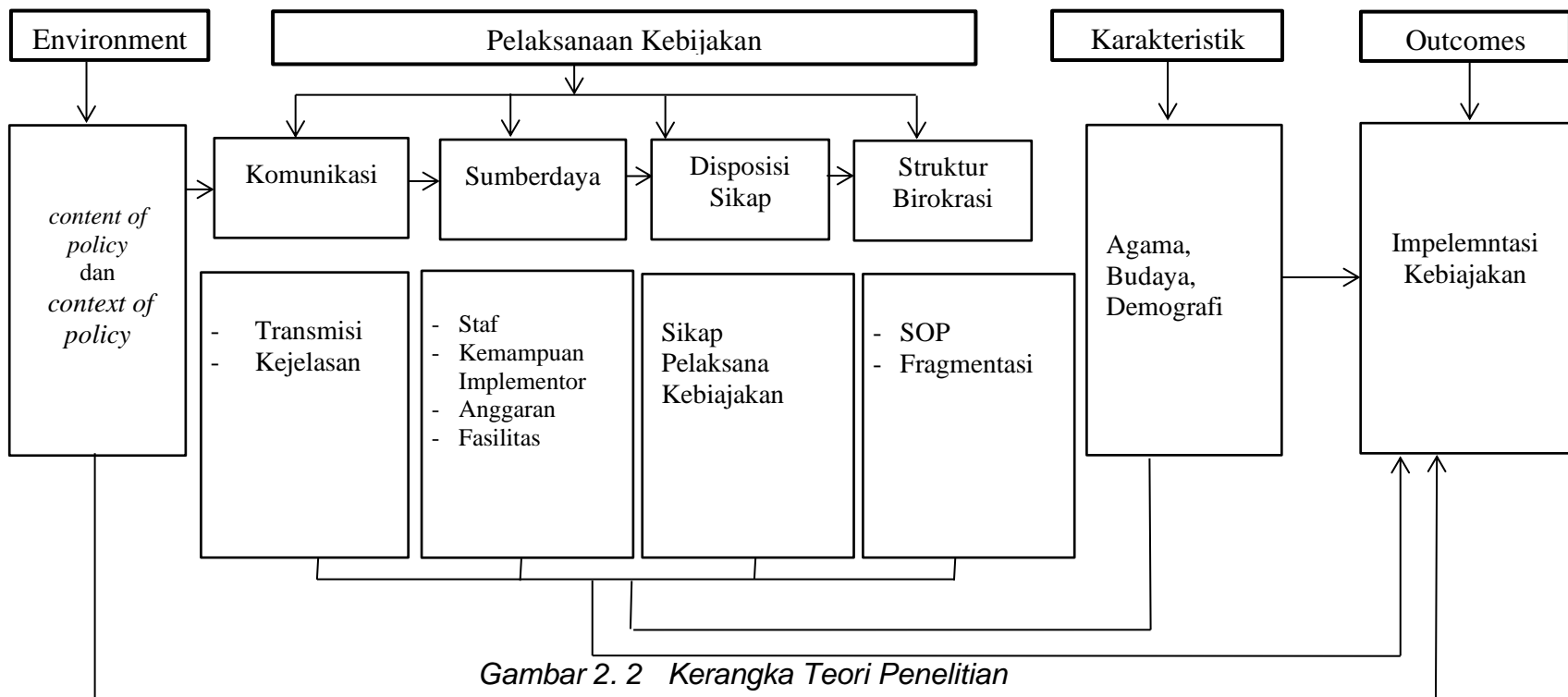
14	Nada Nafira Almanzani	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Banda Aceh	untuk mengetahui implementasi dan hambatan dari kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Banda Aceh.	pendekatan kualitatif dengan menganalisis teori implementasi kebijakan Edward III	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 belum berjalan optimal ditandai dengan aspek kejelasan dan konsistensi komunikasi belum efektif, aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana belum optimal, aspek SOP pada struktur birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya, serta terdapat delapan hambatan, diantaranya rendahnya partisipasi masyarakat, keterpaparan terhadap hoax, keterbatasan petugas vaksinasi COVID-19, insentif petugas vaksinasi COVID-19 yang belum memadai, dosis vaksinasi COVID-19 yang rusak, keraguan terhadap vaksin, aplikasi dan jaringan yang bermasalah, dan pelayanan vaksinasi COVID-19 yang tidak sesuai dengan SOP.
15.	Dwi Rahayu Ningsih	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2021	Untuk menganalisis Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2021	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,	Implementasi kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, tidak didasarkan pada Peraturan Daerah akan tetapi, dalam pelaksanaannya dapat dibentuk Keputusan Walikota Pekanbaru terkait satuan tugas percepatan program vaksinasi di Kota Pekanbaru. faktor penghambat dalam implementasi kebijakan vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru yaitu keterbatasan dosis vaksinasi dari pusat, komunikasi Pemerintahan Kota Pekanbaru dan pemerintahan Provinsi yang kurang baik yang mengakibatkan validasi data terkait vaksinasi masyarakat di Kota Pekanbaru tidak sinkron, dan pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru yang masih takut

					dengan dampak vaksinasi yang negatif.
16	Satya Widhy Widharyadi, Sinta Ningrum, Ida Widianingsih	Implementasi Program Vaksinasi Di Kabupaten Tanggamus	bertujuan untuk menemukan dan memberikan penjelasan mengenai implementasi program vaksinasi nasional di Kabupaten Tanggamus.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala seperti keterbatasan dan keterlambatan distribusi vaksin Covid-19, penyebaran gerai vaksinasi dan tenaga vaksinator yang belum merata, kurangnya sinergi antar instansi dalam pelaksanaan program vaksinasi hingga masih adanya ketakutan masyarakat akan dampak lanjutan pasca vaksinasi. Adapun untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, perlu penguatan sinergi antar instansi dalam percepatan program vaksinasi melalui tahapan pengorganisasian, interpretasi dan penerapan. pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, Perlu analisa dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan kebijakan oleh masing-masing instansi dan stakeholder untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi guna dilakukan pembenahan agar capaian target vaksinasi dapat tercapai sesuai sasaran yang ditetapkan.
17	Ruliani Siregar	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid - 19 Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya	mendeskripsikan implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kedungdoro sebagai upaya perlindungan diri	metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.	Kendala yang ditemui yaitu tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang karena takut terhadap jarum suntik, ketakutan penderita komorbid, dan keraguan akan efektivitas vaksin akibat dari penyebaran berita hoax. Sedangkan dalam indikator context of policy, strategi yang digunakan yaitu sosialisasi, pembuatan grup whatsApp, door to door dan monitoring vaksinasi dilakukan melalui aplikasi

			dari virus covid-19 dengan menggunakan indikator content of policy dan context of policy.		Pcare dan smile. Proses vaksinasi yang dilakukan Puskesmas Kedungdoro sudah sesuai dengan petunjuk teknis, namun hanya saja kurangnya persiapan dalam pelaksanaannya.
18	Yerin Audri Asmono, Achluddin Ibnu Rochim, Bambang Kusbandrijo	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kelurahan Gubeng Surabaya	untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng Surabaya.	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian berdasarkan empat indikator Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi bahwa implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Sosialisasi secara rutin tersebut sebagai bentuk pendampingan lanjutan guna memperkuat kemampuan pelaksana dan sasaran dalam melaksanakan program.
19	Nuraini Fikri, Amal Chalik Sjaaf	Analisis Swot Mengenai Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Dki Jakarta	untuk menganalisis implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh	Data yang digunakan adalah data sekunder berupa kebijakan vaksinasi yang diperoleh melalui situs resmi pemerintah dan berita-berita	Hasil yang didapatkan adalah kerja sama dengan berbagai pihak dan adanya aplikasi JAKI merupakan suatu peluang untuk bisa menerapkan kebijakan vaksinasi secara maksimal.

			Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.		
20	Yowanda Pasyah Dalimunthe, Susilawati	Implementasi kebijakan vaksinasi covid - 19 di Kota Medan menggunakan teori edward III	Untuk menganalisis Implementasi kebijakan vaksinasi covid - 19 di Kota Medan menggunakan teori edward III : meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan	Metode penelitian ini menggunakan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif dengan menganalisis teori implementasi kebijakan Edward III	vaksinasi sebagai upaya mempercepat terwujudnya kekebalan kelompok yang telah mencapai 78,55% di Kota Medan. Himbauan ini dilakukan agar kasus covid segera tiada. Lalu, ketersediaan tenaga dibidang kesehatan juga mendukung proses implementasi kebijakan. Pemerintah Kota Medan memberikan 20.000 vaksin COVID-19 tahap pertama yang diprioritaskan pada tenaga kesehatan. Selanjutnya, perilaku yang dipunyai implementator kebijakan juga bisa berpengaruh pada tingkat keberhasilan kinerja. Alhasil, vaksinasi COVID-19 melakukan pembagian tugas dari pemerintah pusat ke provinsi selanjutnya diserahkan ke pemerintah kota.

H. Kerangka Teori



Gambar 2. 2 Kerangka Teori Penelitian

Sumber : Marilee S. Grindle dalam Agustino (2008), Edward (1980) dalam Widodo (2010)

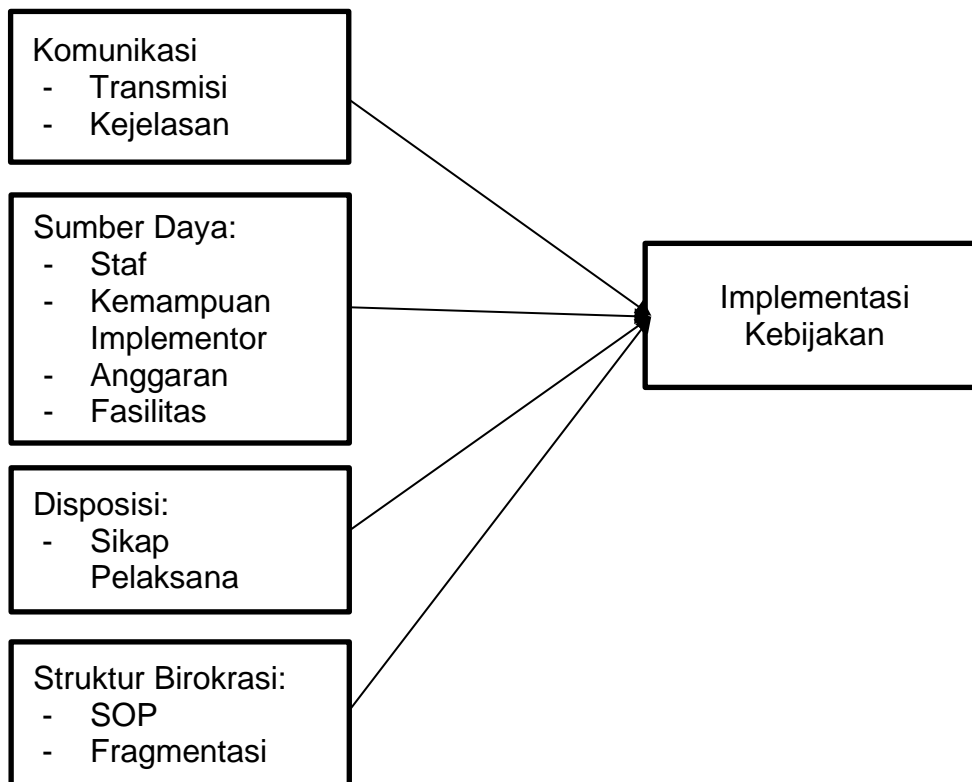
Dalam penelitian ini peneliti fokus utama dalam pelaksanaan vaksinasi. Dimana Menurut George Edward III dalam Widodo (2010), 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan bersumber dalam 4 faktor utama, yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi dimana setiap variabel saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Faktor komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Adapun sumber daya yang dimaksud dalam teori ini meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Faktor disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dan faktor cakupan birokrasi yaitu mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

I. Kerangka Konsep

Berdasarkan landasan teoritis yang telah dipaparkan, survei pendahuluan yang telah dilakukan dan hasil penelitian sebelumnya, maka didapat kerangka konsep penelitian sebagai berikut. Kerangka konsep dalam penelitian ini terdiri dari variable independent yaitu komunikasi yang

terdiri dari transmisi dan kejelasan, sumber daya yaitu staf, kemampuan implementator, anggaran dan fasilitas, factor Disposisi yaitu sikap dan pelaksana, serta faktor Struktur birokrasi yang terdiri dari SOP dan Fragmentasi. Adapaun faktor Dependent yaitu implementasi kebijakan Vaksin COVID-19.

Implementasi kebijakan sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri (Pudjianto dkk, 2021).



Gambar 2. 3 Kerangka Konsep

Implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri. George C. Edward III dalam Nurjaman dan Umam (2012) mengemukakan model implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka

persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III (transmission) dan kejelasan (clarity)

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan

(street-level-bureaucrats) haruslah jelas tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan

2. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

a. Sumberdaya Manusia / staf

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak komponen dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan

atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri

b. Sumberdaya Kemampuan Implementator

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kemampuan implementator. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: kemampuan implementator yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Kemampuan Implementator merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata public tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan.

c. Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya “terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas”. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa “terbatasnya insentif yang diberikan

kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program". Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

d. Sumberdaya Fasilitas / Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

4. Struktur birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

a. Standard Operational Procedure (SOP)

Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Standar Operating Prosedure (SOP), suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan)

b. fragmentasi".

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya

komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif". Melaksanakan fragmentasi, upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

J. Definisi Konseptual

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu proses penyampaian informasi terkait kebijakan vaksinasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kegiatan komunikasi ini sejatinya adalah untuk memastikan apakah implementasi sudah sesuai dengan isi kebijakan publiknya (Pudjianto, 2021).

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah seluruh input berupa SDM (Sumber Daya Manusia), kemampuan implementor, dana, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan vaksin Covid-19..

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan karakteristik yang melekat pada implementor kebijakan. Indikator disposisi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Sikap Pelaksana. Sikap pelaksana terhadap

implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19, dukungan dari pemerintah, pengendalian dan pengawasan

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya.

5. Implementasi kebijakan

Merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pengambil keputusan dengan tujuan untuk menyelenggarakan program vaksinasi Covid-19, yang dilakukan baik secara individu ataupun secara kelompok.